

PENGARUH SISTEM PELAPORAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SURABAYA**Theodora Oktavia Nauli Br Turnip, Endah Susilowati²**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
19013010016@student.upnjatim.ac.id**Abstract**

This study aims to examine and prove the effect of reporting systems, utilization of information technology and the competence of government apparatus on the performance accountability of Surabaya city government agencies. This research uses a quantitative approach. The type of data used is primary data in the form of a questionnaire. Data collection techniques using purposive sampling techniques. The data analysis technique uses multiple regression methods using the help of a statistical analysis tool called Statistical Program for Social Science (SPSS). The results of the study prove that the Competence of Government Apparatus affects the Accountability of Government Agency Performance, but the Reporting System and the Utilization of Information Technology have no effect on the Accountability of Government Agency Performance.

Key Words

Reporting System, Utilization of Information Technology, Competence of Government Apparatus, Accountability of Government Agency Performance, Public Sector Accounting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan metode regresi berganda menggunakan bantuan alat analisis statistik bernama Statistical Program for Social Science (SPSS). Hasil penelitian membuktikan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci

Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntansi Sektor Publik

Pendahuluan

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan salah satu cerminan atau komponen dari efektivitas entitas publik. Salah satu kota yang cukup baik dalam mengelola urusan pemerintahannya adalah Kota Surabaya. Meskipun demikian, Kota Surabaya terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahannya. Untuk mencapai kinerja tersebut diperlukan kejelasan dalam suatu anggaran, pegawai yang memiliki pengendalian akuntansi yang tinggi, dapat mengelola sistem pelaporan, berkemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi, serta kompetensi yang baik.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Output yang dihasilkan dari SAKIP ini berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk menentukan seberapa baik pemerintah menjalankan tugasnya, kinerja harus diukur. Kinerja keuangan atau non-keuangan dapat diukur ketika melakukan evaluasi kinerja. Kinerja non-keuangan dapat diukur dengan mengevaluasi sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana pemerintah dapat mencapai tujuan, sedangkan kinerja keuangan dapat dievaluasi dengan melihat laporan keuangan yang dibuat setiap akhir periode. Dalam berita yang bersumber dari ro-organisasi.jatimprov.go.id, opendata.jabarpov.go.id, tangerangkab.go.id, nttprov.go.id menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas sebagian kecil pemerintah daerah masih rendah, yaitu sekitar 15,64%.

**Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LHE-AKIP) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa
Barat, Nusa Tenggara Timur, & Banten
Pada Tahun 2020-2021**

No	Kategori	Nilai angka	Interpretasi	Jumlah Instansi	Presentase
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan	4	2%
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan	87	45,50%
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik	45	23,56%
4.	B	> 60 – 70	Baik	25	13,08%
5.	CC	> 50 – 60	Cukup	23	12,04%
6.	C	> 30 – 50	Kurang	7	3,60%
7.	D	> 0 – 30	Sangat Kurang	-	-
Jumlah				191	100%

Untuk memantau dan mengawasi kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan, diperlukan sistem pelaporan yang baik. efektivitas manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan dan umpan balik diperlukan untuk mengevaluasi tindakan yang diambil dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam menjalankan suatu rencana atau anggaran sehingga manajemen mengetahui hasil pelaksanaan anggaran atau pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan (Isnanto, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi juga diduga memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Hal terakhir yang mungkin memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kompetensi aparatur pemerintah. Spencer (1993:9) mendefinisikan kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan sebab akibat dengan standar yang dijadikan acuan di suatu tempat kerja atau situasi tertentu

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data yang digunakan merupakan data primer berbentuk kuesioner. Sebanyak 9 Dinas Daerah Kota Surabaya atau 25 responden yang terlibat dalam penelitian ini. Karakteristik responden yaitu pegawai yang menjabat sebagai kepala dinas dan staff keuangan dan pegawai yang telah bekerja minimal setahun. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan terlebih dahulu mengkonversikan skala ordinal ke skala interval melalui metode interval berurutan (*Method of successive interval*). Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan multikolinearitas. Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan uji T dan uji F.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini memperlihatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,723 + 0,083 X_1 + 0,418 X_2 + 0,426 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa pengaruh masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta -2,723 artinya jika variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah tidak mengalami perubahan dengan kata lain diasumsikan bernilai 0, maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya sebesar -2,723
2. Nilai koefisien regresi sistem pelaporan bernilai positif sebesar 0,083 artinya jika variabel sistem pelaporan meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja sebesar 0,083% dengan asumsi koefisien regresi variabel lain tetap bernilai 0. Sebaliknya, jika variabel pengendalian akuntansi menurun sebesar 1% maka akan menurunkan akuntabilitas kinerja sebesar 0,083%.
3. Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif sebesar 0,418 artinya jika variabel kompetensi aparatur pemerintah meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja sebesar 0,418% dengan asumsi koefisien regresi variabel lain tetap bernilai 0. Sebaliknya, jika variabel kompetensi aparatur pemerintah menurun sebesar 1% maka akan menurunkan akuntabilitas kinerja sebesar 0,418%.
4. Nilai koefisien regresi kompetensi aparatur pemerintah bernilai positif sebesar 0,426 artinya jika variabel ketaatan peraturan perundangan meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja sebesar 0,426% dengan asumsi koefisien

regresi variabel lain tetap bernilai 0. Sebaliknya, jika variabel ketaatan pada peraturan perundangan menurun sebesar 1% maka akan menurunkan akuntabilitas kinerja sebesar 0,426%.

Apabila dilihat dari Uji Parsial maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Variabel Sistem Pelaporan (X1) dengan nilai $\text{sig.t } 0,813 > \alpha = 0,05$. Artinya variabel Pengendalian Akuntansi (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
2. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dengan nilai $t\text{-hitung } 1,986 < \text{nilai } t\text{-tabel } 2,093$ dengan nilai $\text{sig.t } 0,062 > \alpha = 0,05$. Artinya variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
3. Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X3) dengan nilai $t\text{-hitung } 2,426 > \text{nilai } t\text{-tabel } 2,093$ dengan nilai $\text{sig.t } 0,025 < \alpha = 0,05$. Artinya variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Kesimpulan

Dari hasil penelitian berikut terdapat beberapa kesimpulan :

1. Pengaruh sistem pelaporan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2) dan kompetensi aparatur pemerintah (X3) secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Pengaruh parsial mempunyai pengaruh positif dan negatif. Variabel yang mempunyai pengaruh negatif yaitu variabel X1 (Sistem Pelaporan) dan X2 (Pemanfaatan Teknologi Informasi).
3. Variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X3)

Saran

1. Bagi dinas pemerintah Kota Surabaya harus meningkatkan sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah agar akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan
2. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Agar menambah sampel yang lebih banyak agar hasil penelitian lebih menggambarkan keadaan sebenarnya.
 - b. Penelitian tidak saja pada dinas pemerintah Kota Surabaya kalau bisa juga tingkat propinsi.
 - c. Kuesioner sebaiknya diisi oleh orang-orang yang memang mengerti dan yang memiliki tanggung jawab yang paling dominan terhadap sistem pelaporan.

Daftar Pustaka

Desmiyawati. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 163-178

Isnanto, Y. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pegendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1), 489-501.
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/3733>

Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 106-115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.